

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman pangan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan pertanian, yaitu sebagai penghasil makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Salah satu komoditas tanaman pangan yang memiliki posisi terpenting sebagai tanaman utama adalah beras. Beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh 90 persen penduduk Indonesia. Pentingnya komoditas beras, dijadikan sebagai acuan dalam menilai kesejahteraan serta kondisi sosial politik masyarakat (Rohman, 2017).

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 255,46 juta dengan tingkat konsumsi beras masyarakatnya sebesar 124,89 kg/kapita/tahun (Leovita dan Fauzi, 2018). Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki tingkat konsumsi beras perkapita yang tinggi. Tingkat konsumsi komoditi beras di Indonesia mencapai 120 kg/kapita/tahun, sedangkan rata-rata konsumsi beras dunia hanya 60 kg/kapita/tahun. Fakta juga membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang masih mengalami kendala khususnya di bidang pangan. Sebelum menjadi negara pengimpor beras, Indonesia pernah meraih predikat swasembada pangan pada tahun 1984-1986 yang konsumsi nasionalnya saat itu hanya 25 juta ton dan mengalami surplus atau penuruanan 2 juta ton. Pada tahun 2014 Indonesia masih menjadi produsen beras tertinggi ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Tahun 2018 produksi padi di Indonesia mencapai 59 juta ton dan menurun pada tahun 2019 menjadi 54 ton. Namun semenjak tahun 2000 Indonesia tercatat tidak pernah absen dalam mengimpor beras. Kondisi tersebut mengartikan bahwa Indonesia memerlukan pangan yang cukup besar. Maka peningkatan produksi beras harus menjadi prioritas utama dalam mengatasi kekurangan permintaan beras (Ariska, 2020).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Provinsi ini juga sebagai salah satu daerah produsen beras di Indonesia (Mahmud dan Mardianto, 2020). Beras merupakan

komoditi tanaman pangan andalan dengan produksi tertinggi dibandingkan komoditi tanaman pangan lainnya di Sumatera Barat (Lampiran 1).

Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 19 Kabupaten dan Kota yang sebagian besar penduduknya didominasi oleh petani. Kondisi alam pada 19 Kabupaten dan Kota berbeda di Provinsi Sumatera Barat menyebabkan beberapa daerah memiliki potensi tanah yang berbeda pula. Sejumlah kabupaten dan kota memiliki potensi daerah tanah yang subur, akan tetapi daerah yang berada di pesisir pantai memiliki potensi tanah yang kurang baik untuk budidaya padi. Hal ini menyebabkan tingkat keberhasilan produksi padi disaat panen relatif berbeda pada setiap kabupaten dan kota (Irwan, 2020).

Data BPS Sumatera Barat tahun 2021 menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi beras dari tahun 2018 hingga 2020 (Lampiran 2). Jumlah produksi beras di Sumatera Barat pada tahun 2018 sampai 2020 berturut-turut adalah 854.311 ton; 854.265 ton; dan 799.122,62 ton. Penurunan jumlah produksi beras juga disebabkan oleh berkurangnya luas panen padi di Provinsi Sumatera Barat yang dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Luas Panen Padi Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2020 :

Tahun	Luas Panen Padi Provinsi Sumatera Barat (Hektar)
2018	313.050,82
2019	311.671,23
2020	295.664,47

Sumber : BPS Sumatera Barat tahun 2021

Luas panen padi pada tahun 2019 sebesar 311,67 ribu hektar mengalami penurunan sebanyak 1.380 hektar atau 0,44 persen dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya luas panen padi pada tahun 2020 sebesar 295,66 ribu hektar juga mengalami penurunan sebanyak 16,01 ribu hektar atau 5,14 persen dibandingkan tahun 2019. Penurunan luas panen yang cukup besar tersebut akan tersebut akan membuat produksi padi juga ikut mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan produksi beras di Provinsi Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2021).

Penurunan produksi beras akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Apabila terjadi kelangkaan atau tidak terpenuhinya kebutuhan beras pada masyarakat, akan berdampak pada inflasi dan gejolak sosial. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjamin adanya ketersediaan pangan akan kebutuhan beras untuk konsumsi pangan masyarakat (BULOG, 2016). Mengingat pentingnya ketersediaan beras, pemerintah menekankan pada pengembangan produksi beras yang tercermin dari berbagai interval kebijakan yang selama ini dilakukan. Kebijakan tersebut yaitu penargetan luas tanam, kebijakan harga dengan menggunakan stok penyangga, subsidi sarana produksi pertanian, serta pengembangan institusional (Purba, 2019).

Teori permintaan menjelaskan bahwa tingkat harga merupakan faktor terpenting yang sangat mempengaruhi besar kecilnya permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa, makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut atau dapat diartikan faktor harga memiliki hubungan negatif terhadap permintaan suatu barang (Sukirno, 2012).

Selanjutnya jumlah penduduk juga berkaitan erat dengan besar kecilnya permintaan beras sebagai bahan pokok di Provinsi Sumatera Barat. Bertambahnya jumlah penduduk Sumatera Barat dari tahun ke tahun akan mendorong tingginya permintaan beras (Lampiran 3). Khairati (2013) menyatakan bahwa ketersediaan pangan memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi permintaan penduduk dalam suatu wilayah. Permintaan beras merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk Sumatera Barat. Peningkatan permintaan beras dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga beras itu sendiri, harga barang substitusi dan komplementer, jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan produksi beras (Dewi, 2016).

Berdasarkan pernyataan diatas, masalah pangan terutama pangan yang terkait dengan permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian yang

berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Beras di Provinsi Sumatera Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Beras merupakan tanaman pangan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia dalam mempertahankan hidupnya. Tinggi rendahnya permintaan beras dapat digambarkan melalui pola konsumsi masyarakat sebagai salah satu bentuk dari pemenuhan kebutuhan primer. Apabila terjadi ketidak seimbangan antara produksi beras dengan jumlah penduduk akan menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan terhadap komoditas beras sebagai makanan pokok penduduk Sumatera Barat. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2020) menjelaskan bahwa perhitungan *demand* beras dihitung dengan cara mengalikan konsumsi beras per penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk.

Sukirno (2012) menjelaskan bahwa tingkat harga sangat mempengaruhi besar kecilnya permintaan terhadap suatu produk. Apabila harga produk mengalami kenaikan maka permintaan terhadap produk tersebut akan mengalami penurunan. Teori permintaan tersebut sesuai dengan permasalahan permintaan beras di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, harga beras selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Lampiran 4). Kenaikan harga beras yang signifikan menyebabkan penurunan permintaan terhadap beras di Provinsi Sumatera Barat yang dibuktikan dengan data konsumsi penduduk Sumatera Barat (Lampiran 5).

Selanjutnya dalam analisis ekonomi, peningkatan jumlah penduduk seharusnya meningkatkan permintaan terhadap beras. Artinya jumlah penduduk memiliki hubungan positif terhadap permintaan beras. Namun sebaliknya permintaan beras di Provinsi Sumatera Barat justru mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan teori permintaan (Nuraini, 2016).

Penurunan permintaan beras juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yaitu diversifikasi pangan yang bertujuan untuk menurunkan konsumsi beras dan beralih kepada pangan non beras (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat,

2017). Kebijakan diversifikasi pangan mendorong adanya komoditi pangan lain yang menggantikan beras sebagai makanan pokok utama di Provinsi Sumatera Barat.

Ir. Efendi selaku Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menyatakan, “Sumatera Barat belum memerlukan impor beras karena masih surplus tahun ini” (Putra, 2021). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pemenuhan pangan penduduk Provinsi Sumatera Barat tidak mendatangkan atau mengimpor dari Provinsi lain sehingga jumlah beras yang dihitung dalam penelitian ini adalah beras yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan beras di Provinsi Sumatera Barat sehingga timbulah pertanyaan penelitian, “Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Beras di Provinsi Sumatera Barat?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan strategis khususnya Bulog dalam proses distribusi beras dan mengatur ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Barat.
2. Sebagai referensi bagi peneliti dimasa mendatang terkait permintaan beras.
3. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menganalisa masalah permintaan beras di Provinsi Sumatera Barat.

E. Batasan Penelitian

1. Variabel lain yang tidak diamati dianggap tidak berpengaruh.
2. Jenis beras tidak dibedakan dan dianggap sama.